



---

## Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial: Catatan tentang Peranan Perguruan Tinggi

---

Johanis Ohoitumur

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

[ohoitumur@yahoo.com](mailto:ohoitumur@yahoo.com)

Anselmus Jamlean

Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

[anseljamlean@yahoo.co.id](mailto:anseljamlean@yahoo.co.id)

---

**Diajukan: 10 Januari 2023; Direview: 12 Januari 2023; Diterima: 15 Januari 2023;  
Dipublish: 21 Januari 2023**

---

**ABSTRACT:** *The history of human civilization has never failed to record the reality of poverty and social injustice. The poor and those who are victims of injustice have always been among us. Today there is a new awareness that classic humanitarian problems are inseparable from environmental problems. Destruction of the environment always results in impoverishment and human suffering. And, conversely, socio-economic marginalization often occurs as a result of exclusive control over natural resources. From an ethical perspective, human and environmental issues are essentially a matter of social injustice. This article intends to trace the views of the church's social teaching on the sustainable development and social justice. Some remarks are also given concerning the role and contribution of universities thereof.*

**KEYWORDS:** ekologi integral, ekologi manusiawi, kesejahteraan umum, solidaritas

### Pendahuluan

Judul tulisan ini merupakan penyempitan terhadap tema yang lebih luas, yaitu *A Sustainable Recovery for People and the Environment*.<sup>1</sup> Tema tersebut memang merujuk kepada kerusakan dan perubahan yang secara radikal diakibatkan oleh pandemi covid-19. Tetapi secara lebih luas tema yang sama menyentuh persoalan-persoalan sosial-politik, ekonomi, dan

---

<sup>1</sup>“*A Sustainable Recovery for People and the Environment*” merupakan tema dari *The Second APTIK International Conference on Poverty and Environment* yang diselenggarakan di Universitas Katolik De La Salle Manado pada 19-20 November 2021.

masalah lingkungan hidup. Asumsi dasar di sini ialah diskursus mengenai masalah kemanusiaan secara esensial tidak dapat dilepaskan dari masalah lingkungan hidup. Benang merah yang menghubungkan dua masalah fundamental itu adalah keadilan sosial.

Tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), *Department of Economic and Social Affairs* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan 17 sasaran (*goals*), yaitu: *No Poverty, No Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry-Innovation and Infrastructure, Reduced Inequality, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace-Justice and Strong Institutions, and Partnership for the Goals*.<sup>2</sup> Sasaran-sasaran yang ditetapkan itu memperlihatkan dimensi-dimensi majemuk dari pembangunan berkelanjutan. Pembahasan atau diskusi dan penelitian mengenai tema “*A Sustainable Recovery for People and the Environment*” dapat dilakukan dari perspektif yang beraneka ragam. Tulisan ini dibatasi pada tema di atas dengan pertanyaan utama tentang keadilan sosial: Bagaimana keadilan sosial menjadi persoalan yang menghubungkan masalah kemanusiaan dan lingkungan hidup? Apa kontribusi yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi bagi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial? Jawaban terhadap persoalan etis ini dilacak dalam dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja, terutama dua ensiklik terkini yang ditulis oleh Paus Fransiskus, yakni *Laudato Si’* (2015) dan *Fratelli Tutti* (2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Ekologi Integral (*Integral Ecology*)

Marilah kita bertitik tolak dari suara Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si*.<sup>3</sup> Di sana Paus Fransiskus berbicara mengenai “ekologi integral”.

---

<sup>2</sup><https://sdgs.un.org/goals>

<sup>3</sup> Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si’*, terjemahan Martin Harun, Seri Dokumen Gereja No. 98 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016).

Gagasan sentralnya sebagai berikut. Bumi sebagai rumah kita bersama sedang sakit dan terancam. Bumi dan manusia diciptakan oleh sang Pencipta dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, hubungan Tuhan dengan ciptaan-Nya didasarkan atas ikatan kasih. Begitu pula hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Interdependensi antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain juga menampakkan proses saling memberi dan mendukung secara berkelanjutan. Bukankah itu ungkapan bahasa kasih? Dengan demikian pemulihan bumi secara ekologis membutuhkan keberpihakan secara eksplisit baik terhadap alam dan sesama manusia maupun terhadap Tuhan yang menciptakan.

Ekologi integral memiliki dimensi lingkungan dan budaya, sosial dan politik, manusiawi dan religius. Dimensi-dimensi itu bersama-sama secara integral memperlihatkan bahwa persoalan ekologi dan persoalan kemanusiaan merupakan dua sisi dari satu kenyataan yang sama. Pelestarian dan pemulihan bumi dan lingkungan secara intrinsik terkait dengan kenyamanan hidup sehari-hari dan kecukupan segala sesuatu yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, kerusakan lingkungan hidup, terutama karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan atas nama pembangunan dan untuk meningkatkan konsumsi, niscaya berdampak pada ketidakadilan, kemiskinan, dan penderitaan. Paus Fransiskus merujuk kepada ensiklik *Caritas in Veritate* (2009) dari Paus Benedictus, katanya, "Kita menyaksikan semacam *superdevelopment* berbentuk hidup boros dan konsumtif yang harus ditolak karena kontras dengan situasi penderitaan tidak manusiawi yang berlangsung terus."<sup>4</sup> Mencuat dalam perspektif ini konsumerisme dan hedonisme bukan hanya sebagai indikator persoalan sosial, melainkan juga sebagai wujud keserakahan hati manusia.

Ekologi integral paling kelihatan pada dua tingkatan, yaitu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan bersama. Tingkatan yang pertama berkaiatan dengan keseluruhan kehidupan yang konkret, sedangkan yang

---

<sup>4</sup>Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si*, No. 109.

kedua menyangkut apa yang menjadi kondisi umum kehidupan masyarakat. Dua pokok ini membutuhkan penjelasan lebih jauh.

### **Ekologi Manusiawi (*Human Ecology*)**

Ekologi hidup sehari-hari meliputi peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam ruang privat, keluarga, komunitas-komunitas, desa-desa, kota-kota, dan ruang-ruang publik. Ruang-ruang kehidupan itu tidak lolos dari perasaan, afeksi, sikap, dan tindakan manusia. Kondisi lingkungan tentu saja turut berpengaruh. Akan tetapi di semua tempat itu, identitas manusia sebagai manusia mesti diakui. Identitas manusiawi menjadi kabur ketika suasana atau kondisi kehidupan menjadi kacau, sarat konflik, bisung, dan penuh ancaman. Akar dari absurditas itu ialah polarisasi kehidupan masyarakat di mana kaum miskin dan mereka yang dimarginalisasi terasing dari mereka yang hidup dalam kenyamanan dan kecukupan. Dalam masyarakat kota, polarisasi itu mencuat secara eksplisit pada wilayah miskin dan kumuh dan kompleks perumahan yang tergolong "*gated community*". Dewasa ini tingkat ketersediaan sumber air bersih telah menjadi salah satu indikator dari polarisasi itu. Sumber air yang secara alamiah terbuka bagi akses publik, kini telah dibatasi oleh perusahaan air minuman kemasan. Warga *gated community* dapat menikmati air kemasan itu secara berlimpah ruah, sedangkan kaum miskin dan kaum marginal tidak mengalami keberuntungan yang sama. Namun, sebaliknya, seperti dikatakan dalam *Laudato Si'*, "Kadang-kadang ekologi manusiawi yang dapat dikembangkan oleh orang miskin di tengah begitu banyak keterbatasan patut dipuji."<sup>5</sup> Mereka menciptakan lingkungan kumuh dan miskin menjadi suasana kehidupan sehari-hari yang nyaman bagi warga setempat. Di sana terjalin persaudaraan dan hidupnya semangat tolong menolong tanpa pamrih. Di sana juga terdapat sistem sosial yang melibatkan setiap warga tanpa diskriminasi, dan setiap warga mengenal sesamanya sebagai saudara. Ekologi manusiawi seperti itu sering kali kontras dengan anonimitas antara warga suatu *gated community*. Tidak

---

<sup>5</sup>Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, No. 148.

mustahil bahwa kondisi kemiskinan justru membangkitkan solidaritas sosial secara kreatif, dibandingkan dengan kemapanan hidup yang memenjarakan kehidupan sehari-hari di balik tembok-tembok rumah dan perumahan. Dapat disimpulkan bahwa polarisasi secara sosial mengindikasikan kondisi yang berbeda-beda, tidak saja dalam perspektif ekonomi, melainkan juga kualitas kehidupan. Ekologi manusiawi dan kualitas hidup manusia yang otentik justru bisa ditemukan pada kalangan kaum miskin dan kaum marginal yang hidupnya serba terbatas. Sebaliknya, mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi yang kelihatan mapan, justru mengalami kemerosotan kualitas hidup. Jadi, mereka yang memiliki standar hidup yang tinggi tidak dengan sendirinya memiliki kualitas hidup manusiawi yang otentik. Kenyataan ini tergolong sebagai ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang mesti dilakukan? Dalam konteks kapitalisme abad ke-19, Karl Marx pernah mengusulkan pembubaran kelas-kelas sosial melalui revolusi agar masyarakat hidup bersama dengan milik bersama. Ia menggagas “masyarakat tanpa kelas” (*classless society*) atau “masyarakat komunis” (*communist society*). Ciri masyarakat komunis ialah kepemilikan bersama semua properti dengan akses yang sama terhadap produksi. Di sini hak milik pribadi ditiadakan. Marx berpikir bahwa dengan begitu eksploitasi kaum miskin oleh kaum borjuis akan berakhir.<sup>6</sup> Namun sejarah negara-negara komunis di dunia membuktikan bahwa gagasan itu gagal dan tidak realistis. Filsuf Inggris, John Locke telah merumuskan di abad ke-18 bahwa memiliki sesuatu secara perorangan merupakan suatu hak kodrati (*natural right*) atau hak asasi manusia (*human right*) yang tidak boleh dicabut oleh negara sekalipun.

Ajaran Sosial Gereja sejak ensiklik *Rerum Novarum* (1891) oleh Paus Leo XIII sampai sekarang secara konsisten memberikan arah yang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Bdk. Richard W. Miller, “Social and Political Theory: Class, state, revolution,” dalam *The Cambridge Companion to Marx*, edited by Terrell Carver (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991), 55-105. Lihat juga: Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 116-119.

<sup>7</sup>Paus Leo XIII, *Ensiklik Rerum Novarum*, terjemahan R. Hardawiryana, Seri Dokumen Gereja No. 42, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022).

Eksplorasi manusia oleh manusia dan perusakan lingkungan hidup harus dihentikan. Tentang kepemilikan privat dikatakan, “hukum kodrati merupakan dasar bagi pembagian harta benda dan bagi pemilikan perorangan”.<sup>8</sup> Selanjutnya, “Maka hak atas pemilikan, yang seperti ternyata diberikan oleh kodrat kepada orang perorangan, harus ada pula pada pria sebagai kepala keluarga.”<sup>9</sup> Demikian hak milik pribadi pertama-tama bermanfaat untuk kesejahteraan hidup keluarga. Akan tetapi hak milik itu tidak mutlak dan tidak tanpa syarat, tidak untuk diri sendiri saja. Mereka yang memiliki kelebihan kekayaan (*surplus goods*) punya tugas khusus untuk berbagi dengan kaum miskin. Dalam ensiklik Paus Paulus VI berjudul *Populorum Progressio* (1967), Paus Paulus VI mengutip kata-kata inspiratif dari St. Ambrosius berikut: “Apa yang kamu miliki, tidak kamu hadiahkan kepada orang miskin; tetapi kamu mengembalikan miliknya kepadanya. Kamu telah menjadikan kepunyaanmu hal-hal yang dimaksudkan untuk digunakan oleh semua orang. Bumi milik semua orang, bukan milik orang-orang kaya.”<sup>10</sup> Kutipan ini mengindikasikan bahwa barang-barang duniawi memiliki nilai sosial atau aspek karitatif, selain tentu nilai ekonomis. Dalam dokumen yang sama, *Populorum Progressio*, ditunjuk pula bagaimana polarisasi sosial diatasi, yakni melalui perjumpaan manusia dengan manusia. Mereka yang lebih beruntung harus menjumpai mereka yang kurang beruntung, yang kaya menjumpai yang miskin dan yang termarginalisasi. Perjumpaan dan dialog, duduk bersama secara setara dan bermartabat, merupakan pilihan untuk mewujudkan solidaritas sosial, keadilan sosial, dan cinta kasih bagi semua.<sup>11</sup> Artinya, di sini dihindari sistem ekonomi yang menyerahkan keadilan dan kepedulian sosial kepada kekuasaan di atas untuk meneteskan bantuan kepada kaum miskin tanpa peranan mereka sendiri. Solidaritas, keadilan sosial, dan cinta kasih bukanlah suatu perjalanan soliter yang tergantung pada pihak yang

---

<sup>8</sup> Paus Leo XIII, *Ensiklik Rerum Novarum*), No. 9.

<sup>9</sup> Paus Leo XIII, No. 10.

<sup>10</sup> Paus Paus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, terjemahan R. Hardawiryana, Seri Dokumen Gereja No. 37, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), No. 23.

<sup>11</sup> Bdk. Paus Paulus VI, No. 43-44.

mengendalikan harta benda. Setiap bentuk solidaritas sosial dan penegakan keadilan sosial harus melibatkan kaum miskin. Hanya dengan begitu, eksploitasi dan kesewenang-wenangan dapat dihindari.

Apakah aspek-aspek sosial itu terpisah dari persoalan ekologi? Dalam perspektif ekologi integral, jawabannya: Tidak. Paus Fransiskus mengingatkan, “Pola berpikir yang tidak memberi ruang kepada kepedulian yang tulus kepada lingkungan hidup adalah pola pikir sama yang tidak memberi ruang untuk menyertakan mereka yang paling rentan”<sup>12</sup> Pernyataan ini menyiratkan bahwa konsep “ekologi manusiawi” secara utuh mengandung dimensi ekologis dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

### **Kesejahteraan Umum (*the Common Good*)**

Melalui Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* (1965), Konsili Vatikan II merumuskan “kesejahteraan umum” (*the common good*) sebagai “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.”<sup>13</sup> Paus Fransiskus menjabarkan prinsip kesejahteraan umum sebagai berikut.

Kesejahteraan umum mengandaikan penghormatan terhadap pribadi manusia apa adanya, dengan dengan hak-hak dasar dan mutlak yang diarahkan kepada pengembangannya yang integral. Kesejahteraan umum juga menuntut kesejahteraan sosial dan pengembangan berbagai kelompok perantara, sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Di antaranya mencolok secara khusus adalah keluarga sebagai sel dasar masyarakat. Akhirnya, kesejahteraan umum membutuhkan kedamaian sosial, yang berarti stabilitas dan keamanan berdasarkan tata tertib tertentu, yang tidak dapat dicapai tanpa perhatian khusus untuk keadilan distributif, yang pelanggarannya

---

<sup>12</sup> Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, No. 196.

<sup>13</sup> Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, terjemahan R. Hardawiryana, Seri Dokumen Gereja No. 19, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), No. 26.

selalu menimbulkan kekerasan. Seluruh masyarakat – dan di dalamnya secara khusus negara – memiliki kewajiban untuk membela dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

Dalam kondisi di mana terjadi ketidakadilan atau ketimpangan sosial, banyak orang yang terpinggirkan dan dirampas hak-haknya, tuntutan kesejahteraan umum mencuat sebagai problem keadilan sosial. Prinsip kesejahteraan umum menuntut penghormatan terhadap martabat luhur manusia, yang secara konkret diaktualisasi pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Implikasi logisnya, solidaritas sosial dan pilihan mengutamakan kaum miskin menjadi keniscayaan etis. Sekali lagi, polarisasi akibat sistem ekonomi dan politik yang tidak melayani hak-hak semua orang secara setara menimbulkan ketidakadilan sosial.

Para filsuf memang berbicara tentang keadilan sosial dari perspektif yang berbeda-beda. John Rawls, filsuf yang terkenal berkat bukunya *A Theory of Justice* (1971) mengerti keadilan sebagai *fairness*. Ia berargumentasi bahwa kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*) dapat diintegrasikan dalam prinsip keadilan. Ia menulis, “[Prinsip-prinsip keadilan] adalah prinsip-prinsip yang diterima oleh orang-orang secara bebas dan rasional yang berkepentingan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dalam posisi awal kesetaraan sebagai yang menentukan syarat-syarat mendasar dari persekutuan mereka. Prinsip-prinsip ini mengatur semua kesepakatan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang dapat dipusatkan dan bentuk pemerintahan yang dapat didirikan. Cara memandang asas keadilan ini saya sebut keadilan sebagai *fairness*.”<sup>15</sup> Menurut Rawls keadilan berkaitan erat dengan kebebasan individual dan kesetaraan yang harus ditegakkan dalam kerja sama sosial suatu masyarakat melalui pengaturan secara transparan dan dapat diterima semua. Dalam kerja sama terstruktur itu, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka perlindungan maksimal dan keberpihakan harus diberikan kepada kaum yang paling tidak beruntung (*the greatest for the least advantaged*).

---

<sup>14</sup>Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, No. 157.

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1991), 11.



Pandangan Rawls itu ditanggapi oleh Amartya Sen, filsuf sosial dan ahli ekonomi yang meraih hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 1998. Dalam bukunya *The Idea of Justice* (2009) yang dipersembahkan sebagai kenangan akan John Rawls, Sen menunjukkan bahwa paham keadilan Rawls terlalu bersandar pada teori kontrak sosial klasik sejak Thomas Hobbes (1588-1679). Pendekatan Rawls dianggap tidak memadai untuk menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat aktual dan persoalan-persoalannya. Sen mengakui bahwa institusi sosial merupakan dasar bagi tegaknya keadilan, tetapi penegakan keadilan membutuhkan tindakan atau perilaku aktual (*actual behaviour*). Sen maksudkan perilaku riil yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan bukan perilaku normatif sesuai tuntutan institusi.<sup>16</sup> Atas cara itu, Sen ingin menekankan pentingnya dan mendesaknya pengalaman keadilan, bukan sekedar struktur-struktur sosial yang menjamin keadilan. Pengalaman keadilan yang riil itu terjadi apabila terdapat kesesuaian antara institusi atau struktur dasar sosial yang adil dan perilaku sehari-hari yang adil sebagai realisasinya.<sup>17</sup>

Keadilan sosial niscaya membutuhkan struktur sosial-ekonomi dan sistem politik yang melayani semua orang secara setara. Namun betapapun pentingnya institusi-institusi sosial-politik, pengalaman aktual sewajarnya menjadi indikator utama tegaknya keadilan. Salah satu bentuk pengalaman keadilan terjadi melalui solidaritas sosial. Dalam ensiklik *Fratelli Tutti* (2020) Paus Fransiskus menulis,

Pada saat ini ketika segala sesuatu tampak terpecah-pecah dan kehilangan konsistensi, ada baiknya kita berpaling kepada soliditas, yang berasal dari pemahaman bahwa kita bertanggung jawab atas kerapuhan orang lain, saat kita berusaha membangun masa depan bersama. Solidaritas ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan, yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Pelayanan adalah 'sebagian besar,

---

<sup>16</sup>Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 7.

<sup>17</sup>Amartya Sen, 68.

menjaga kerapuhan orang. Melayani berarti merawat mereka yang lemah di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita'. Dalam komitmen ini, masing-masing mampu mengesampingkan kebutuhan, harapan, keinginannya untuk berkuasa di hadapan tatapan nyata orang-orang yang paling rapuh. [...] Pelayanan selalu memandang wajah saudara itu, menyentuh dagingnya, merasakan kedekatannya sampai pada titik 'merasakan sakitnya', dan mengusahakan kemajuan saudara itu. Karena itu, pelayanan tidak pernah ideologis, karena yang dilayani bukan ide melainkan pribadi.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Paus Fransiskus menjelaskan,

Kata ini [solidaritas] mengungkapkan lebih dari sekadar beberapa tindakan kemurahan hati yang tidak tentu. Kata ini berarti berpikir dan bertindak dalam semangat komunitas, memprioritaskan kehidupan semua orang di atas perampasan barang oleh beberapa orang. Kata ini berarti juga memerangi penyebab struktural dari kemiskinan, ketimpangan, kurangnya pekerjaan, tanah dan perumahan, pengingkaran hak-hak sosial dan ketenagakerjaan. Artinya, menghadapi dampak merusak dari kerajaan uang [...]. Solidaritas, dipahami dalam arti yang paling dalam, adalah suatu cara mencipta sejarah, dan itulah yang dilakukan oleh gerakan-gerakan populer.<sup>19</sup>

Jelas kiranya bagaimana kesejahteraan umum mewajibkan praktik dan pengalaman keadilan sosial. Sedangkan solidaritas sosial dalam artinya yang terdalam merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepada kepentingan mereka yang tidak beruntung atau yang menjadi korban ketidakadilan sistem sosial-politik dan ekonomi.

## **Penutup: Peranan Perguruan Tinggi**

Alur argumentasi dari uraian dalam tulisan ini kiranya memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan pembangunan

---

<sup>18</sup> Paus Fransiskus, *Ensiklik Fratelli Tutti*, terjemahan Martin Harun, Seri Dokumen Gereja No. 124, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021) No. 115.

<sup>19</sup> Paus Fransiskus, No. 116.

berkelanjutan (*sustainable development*), tetapi itu hanya mungkin apabila keadilan sosial ditegakkan. Keadilan sosial tersebut secara fundamental bercorak intrinsik pada ekologi integral, ekologi manusiawi, dan kesejahteraan umum. Artinya, keadilan sosial merupakan roh dari tiga konsep fundamental tentang kehidupan riil dalam masyarakat. Keadilan sosial mesti menjadi kriteria untuk mengukur kualitas hubungan manusia dengan alam (ekologi integral), kualitas hubungan individu dan keluarganya dalam masyarakat basis (ekologi manusiawi), dan kualitas hubungan institusi-institusi publik dengan kepentingan individu, keluarga dan komunitas-komunitas sosial (kesejahteraan umum).

Selanjutnya, jelas pula dari uraian di atas bahwa pembangunan menuju masyarakat berkelanjutan melibatkan dua faktor fundamental. Pertama, ekologi integral di mana aspek ekologi dan kemanusiaan dipahami sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan. Itulah ekologi manusiawi. Cara hidup manusiawi mesti mendukung kelestarian lingkungan, dan sebaliknya pelaksanaan tanggung jawab manusia terhadap alam sewajarnya berdampak pada kesejahteraan hidup individu, keluarga dan masyarakat. Kedua, tegaknya keadilan sosial menjadi indikator terealisasinya kesejahteraan umum. Selain struktur atau sistem sosial yang melayani semua pihak secara adil, keadilan sosial mesti menjadi aktual dalam pengalaman. Salah satu wujud paling konkret dari pengalaman keadilan adalah solidaritas sosial.

Pembangunan berkelanjutan tidak pernah menjadi tanggung jawab satu atau beberapa institusi saja. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dirinya bercorak integral, artinya terbuka dan mengundang semua pihak untuk ikut terlibat secara aktif. Oleh karena bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi, selalu memiliki orientasi ke masa depan, maka di sini relevan untuk dikemukakan pertanyaan: Apa yang kiranya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan masyarakat berkelanjutan dan keadilan sosial? Paling tidak bisa ditunjuk tiga arah peranan perguruan tinggi dalam mendukung perwujudan keadilan sosial sebagai prinsip fundamental pembangunan berkelanjutan.

Pertama, perguruan tinggi bertugas mengadakan penelitian mengenai kondisi, sistem, dan struktur sosial, ekonomi dan politik yang berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup, munculnya kemiskinan, penderitaan, kondisi kerja yang tidak adil dan praktik korupsi, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Sebagai contoh, perlu diteliti apa yang disebut “budaya membuang” dan logika “pakai dan buang” yang memunculkan bentuk-bentuk baru kemiskinan.<sup>20</sup> Sejalan dengan konsep ekologi integral, penelitian yang dilakukan mengambil perspektif interdisipliner, termasuk juga dialog antara iman dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hasil dari penelitian-penelitian hendaknya mengandung dimensi aplikatif, sehingga dampak kajian-kajian ilmiah dapat menjawab kebutuhan aktual sehari-hari.

Kedua, dalam pengajaran-pengajarannya perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memanfaatkan penemuan-penemuan terbaru mengenai kondisi kemanusiaan dan lingkungan hidup. Mahasiswa sebagai generasi masa kini dan masa depan perlu dibantu untuk mengetahui secara mendalam kondisi-kondisi zaman dan persoalan-persoalannya. Mereka perlu terbuka dan mengkritisi struktur dan sistem sosial politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka juga perlu mengerti secara mendalam latar belakang dan akar-akar terjadinya kemerosotan kualitas kehidupan manusia dan hancurnya lingkungan hidup. Sebagai masyarakat akademik, dosen dan mahasiswa bersama-sama hendaknya tidak menutup mata terhadap budaya relativisme yang menurut Paus Fransiskus merupakan “penyakit yang sama yang mendorong seseorang untuk mengeksploitasi sesamanya dan memperlakukannya sebagai objek saja, dengan mewajibkannya untuk kerja paksa, atau memperbudaknya karena utang. Cara berpikir yang sama mendorong eksploitasi seksual terhadap anak-anak atau penelantaran orang lansia yang tidak lagi berguna untuk kepentingan pribadi.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bdk. Paus Fransiskus, *Ensiklik Fratelli Tutti*, No. 118-121; Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, No.123.

<sup>21</sup> Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, No.123.

Ketiga, perguruan tinggi dapat mengambil bagian dalam membentuk generasi muda yang memiliki wawasan dan karakter yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Mereka perlu mengembangkan pola pikir bahwa:

- Orang kaya dan orang miskin memiliki martabat yang sama luhurnya, dan setiap orang memiliki hak untuk mengakses kesejahteraan umum.
- Jalan untuk turut membangun suatu masyarakat yang adil dan sejahtera bersama ialah berani keluar dari diri sendiri, berjumpa dan berdialog dengan orang lain, berjalan bersama mereka, bersedia mendengar suara orang lain, dan membangun persaudaraan dalam pengharapan.
- Benar seperti ditulis Paus Fransiskus: “Lingkungan alam adalah harta kita bersama, warisan seluruh umat manusia, tanggung jawab semua orang.”<sup>22</sup>
- Memberikan perhatian yang tulus kepada lingkungan hidup sama artinya dengan menaruh kepedulian kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan.

Tiga peranan perguruan tinggi tersebut dapat menjadi kontribusi yang penting dalam gerakan bersama menuju masyarakat berkelanjutan di mana keadilan sosial, persaudaraan manusiawi, dan lestariannya lingkungan hidup menjadi karakteristiknya.

---

<sup>22</sup> Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si'*, no.95

## Daftar Pustaka

- Amartya Sen. 2009. *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press.
- David J. O'Brian and Thomas A. Shannon. *Catholic Social Thought: The Documentary Heritage*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1998.
- Franz Magnis-Suseno. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme.*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- John Rawls. 1991 [1971]. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Oxford: Oxford University Press.
- Paus Fransiskus. *Ensiklik Laudato Si'*. Terjemahan Martin Harun. Seri Dokumen Gereja No. 98. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.
- Paus Fransiskus. *Ensiklik Fratelli Tutti*. Terjemahan Martin Harun. Seri Dokumen Gereja No. 124. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 202.
- Richard W. Miller. "Social and Political Theory: Class, state, revolution." Dalam *The Cambridge Companion to Marx*, edited by Terrell Carver (Cambridg, UK: Cambridge University Press, 1991, 55-105.